

PERUBAHAN POLITIK OLEH FAKTOR AGAMA

POLITICAL CHANGES OF RELIGION FACTORS

Budi Pramono
Universitas Pertahanan
Budipram88@yahoo.com

Abstract

The Islamic revolution in Iran in 1979 was a unique process of political changes in all over the world. The autocratic state led by the Pahlavi dynasty was transformed into a state that made religious values as the basis of state administration. Thus, this writing will discuss about the chronology of Islamic revolution started since Reza Pahlavi era up to the establishment of an Islamic state. By using descriptive analysis, to deepen the political changes, the writer will use the component of political system in political changes context by Huntington, furthermore, the criteria of political developments by Almond and Powell --- The political system component in Iran did not support the continued maintenance of the Pahlavi dynasty regime. It can be clearly seen there was no such a thing like political developments but the collapse of the regime.

Keywords: The revolution in Iran, political changes, religion

Abstrak

Revolusi Islam di Iran pada 1979, merupakan sebuah proses perubahan politik yang unik di dunia. Negara otokratik yang dipimpin oleh dinasti Pahlavi mengalami perubahan menjadi negara yang menjadikan nilai agama sebagai dasar penyelenggaraan negara. Tulisan ini akan membahas revolusi Islam secara kronologis dimulai dari sejak berkuasanya Reza Pahlavi sampai dengan pembentukan negara Islam. Dengan menggunakan deskriptif analisis, sementara, untuk mendalami perubahan politik akan digunakan komponen sistem politik dalam konteks perubahan politik seperti yang diajukan Huntington, serta, kriteria perkembangan politik yang diajukan oleh Almond dan Powell --- lewat itu akan tampak dengan jelas, ternyata, komponen dalam sistem politik di Iran tidak mendukung tetap terjaganya keberlangsungan rezim dinasti Pahlavi. Hal tersebut tampak dengan jelas, tidak terjadinya perkembangan politik menuju sistem yang lebih baik, telah mendorong kepada kejatuhan rezim.

Kata kunci: revolusi iran, perubahan politik, agama

Pendahuluan

Tidak ada yang bisa menepis, betapa, Revolusi Islam yang terjadi di Iran adalah merupakan anomali dari proses modernisasi di negara tersebut. Ironisnya, pemerintahan Reza Pahlevi yang telah melakukan modernisasi di segala bidang, malahan menghasilkan prakondisi bagi terjadinya gerakan yang masif terhadap kekuasaannya. Ketidakpuasan rakyat atas berbagai kebijakan Reza semakin lama memuncak dan berhasil diakomodasi oleh kelompok mullah.

Kekuasaan Shah selama 26 tahun, sejak Perdana Menteri Musaddiq dilengserkan oleh kudeta yang direncanakan CIA pada 1953, serta Reza

Pahlevi yang melarikan diri ke luar negeri pada 1979, nyatanya, tidak berhasil menjadi katalisator berkembangnya demokrasi. Sebaliknya, rakyat justru memilih menggunakan sistem pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam untuk menggantikan pemerintahan otokrasi yang diusung oleh Shah.

Kondisi Iran menarik untuk dikaji, khususnya dari perubahan politik yang terjadi. Hal tersebut mengingat, perubahahan ini melibatkan berbagai macam aktor dan kelompok-kelompok Islam tampil sebagai motor dengan Ayatollah Khomeini yang merupakan simbol perlawanan –dan juga pelbagai macam sektor yang berpengaruh terha-

dapat perubahan politik. Bagi komunitas muslim dunia, walau tidak beraliran Sunni, namun, Revolusi Iran juga menjadi salah satu simbol taring/kekuatan Islam. Sehingga secara tegas dapat dikatakan, pasca runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada 1922, ternyata, kekuatan Islam masih layak untuk diperhitungkan,

Dalam kajian ini, pembahasan akan menggunakan metode deskriptif analisis (Basuki, 2010, hlm. 130). Selanjutnya, meminjam Almond dan Powell dalam karya mereka *Comparative Politics: A Developmental Approach* terbitan 1966 (dalam Randall dan Theobald, 1985, hlm. 28-29) mengutarakan lima kriteria terjadinya perkembangan politik dalam suatu sistem politik. *Pertama*, kapabilitas ekstraktif; yakni kapabilitas untuk mengumpulkan material dan sumber daya manusia dari lingkungan. *Kedua*, kemampuan regulatif yang merujuk kepada kontrol terhadap perilaku individu dan kelompok dalam sistem. *Ketiga*, sistem distributive; yakni kemampuan untuk mengalokasikan barang, jasa, kehormatan, status, dan kesempatan lain di masyarakat. *Keempat*, kapabilitas simbolis; yaitu keefektifan dalam mengasosiasikan diri dengan bendera, seremoni militer, dan lagu nasional. *Kelima*, kemampuan responsive; yaitu kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara *input* dan *output* secara keseluruhan. Almond dan Powell, bahkan memperkirakan kapabilitas sistem politik akan meningkat seiring dengan diferensiasi fungsi dan struktur politik, sekularisasi dan modernisasi untuk menghadapi permasalahan dalam perkembangan demokrasi.

Berkait dengan yang tersebut di atas, meminjam Huntington (1971, hlm. 316), sistem politik yang sedang berjalan memainkan peran yang signifikan dalam perubahan politik. Dan berikut adalah pelbagai komponennya:

- (a) kebudayaan, termasuk di dalamnya nilai, sikap, orientasi, kepercayaan akan mitos, dan keyakinan soal politik dan apa yang dominan dalam masyarakat.
- (b) struktur termasuk organisasi formal yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan seperti partai politik, legislatif, eksekutif, dan birokrasi.
- (c) kelompok-kelompok, termasuk soal

formasi sosial dan ekonomi, kelompok formal dan informal, yang berpartisipasi dalam politik dengan tujuan mengubah struktur.

(d) kepemimpinan, individu dalam institusi politik yang mampu mempengaruhi kelompok lain dalam alokasi nilai.

(e) kebijakan, pola aktivitas pemerintah, yang didesain secara sadar untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan penalti dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, komponen-komponen dalam sistem politik terus berubah meski dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Huntington (1971, hlm. 316) terkait hal ini. (1) komponen apa yang memiliki peran lebih besar dalam perubahan politik, (2) kecepatan perubahan, cakupan, dan arah komponen, (3) hubungan antara satu komponen dan komponen lainnya.

Gaya Kekuasaan Pahlevi

Sejatinya, kelemahan pada awal kekuasaan Reza Pahlavi dimulai karena ia harus menghadapi kekuatan Iran, di antaranya ulama, saudagar, dan tuan tanah yang masih berpegang teguh dengan nilai-nilai kehidupan tradisional. Akhirnya, Shah mengusung visi modernisasi yang mampu menjadi pijakan utama dalam menjalankan kekuasaan (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 69-70), dengan membangun narasi besar tentang kejayaan masa lalu bangsa Iran dan nasionalisme yang didasarkan kepada kepatuhan terhadap monarki (Jahanbegloo, 2013, hlm. 13). Kemudian, ia membangun pengkultusan atas dirinya—suatu hal yang wajar dilakukan dalam pemerintahan otokrasi dengan memberikan gelar-gelar tinggi, di antaranya Aryan Mehr (Arya Sang Matahari).

Untuk mencapai Iran yang jaya, Pahlevi memformulasikan kebijakan sejak 1963. Revolusi putih yang diinisiasi pemerintahannya adalah merupakan kebijakan yang digunakan untuk melawan narasi revolusi merah. Adapun, revolusi putih meliputi upaya reformasi lahan, peningkatan derajat dan partisipasi perempuan dalam masyarakat, peningkatan kapabilitas ekonomi, dan pemba-

ngunan yang masif.

Semasa berkuasa, Reza Pahlavi membangun tiga pilar yang menjadi instrumen dalam mempertahankan kekuasaan: yakni militer, birokrasi, dan juga patronase pengadilan (Abrahamian, 2008, hlm. 123). Kekuasaan militer diperkuat, menteri pertahanan diubah namanya menjadi menteri perang –hal ini untuk mengaskan bahwa sipil tidak ikut dalam urusan militer. Tidak hanya itu, anggaran militer meningkat dua belas kali lipat dari 60 juta dolar AS pada 1954 menjadi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 1973. Personil militer dan gendarmarie (tentara yang bertugas menegakkan hukum sipil) pun meningkat drastis. Pada rentang 1975, Shah memiliki Angkatan Laut terbesar di Teluk Persia, Angkatan Udara terbesar di Asia Barat, dan Angkatan Darat terbesar kelima di seluruh dunia. Modernisasi persenjataan dilakukan dengan cepat (Abrahamian, 2008, hlm. 124).

Adapun, salah satu terjadinya peningkatan kapabilitas militer adalah karena faktor eratnya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Hal tersebut tampak dengan jelas, sekitar 1960, Iran adalah penerima bantuan terbesar AS di luar negara-negara NATO. Sementara, pada 1959, Iran mendapatkan bantuan sebesar 159 juta dolar AS, suatu jumlah fantastis mengingat anggaran pertahanan Iran pada 1957 berjumlah 137 juta dolar AS (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 79).

Selanjutnya, birokrasi juga menjadi alat efektif bagi Shah untuk mengontrol masyarakat. Pengaruh birokrasi semakin meluas bahkan sampai ke desa-desa paling terpencil. Struktur birokrasi menjadi sangat kompleks dan “gemuk”. Kementerian meningkat dari dua belas menjadi dua puluh. Pemerintah membentuk kementerian-kementerian baru yang sebelumnya tidak ada. Pada 1975, jumlah PNS mencapai 304.000, termasuk pekerja lepas kerah biru dan kerah putih. Jumlah provinsi pun ditingkatkan, dari sepuluh menjadi dua puluh tiga. Pada tiap provinsi terdapat 400 distrik, di setiap distrik terdapat mayor, kepala desa, dan parlemen di tingkat desa. Pada 1977, negara membiayai gaji dari setengah pekerja di seluruh negeri (Abrahamian, 2008, hlm. 126).

Ekonomi Iran berkembang begitu pesat di bawah kekuasaan Reza Pahlavi. Penetrasi modal asing merambah dengan cepat dan berkembangnya pasar menghasilkan akumulasi modal dan re-

produksi kapitalis. Pemasukan minyak bumi terus meningkat dan menjadi sumber pemasukan utama untuk melakukan pembangunan di Iran. Pada 1972-1973, pemasukan dari minyak bumi sebesar 2,8 miliar dolar AS, meningkat menjadi 17,8 miliar dolar AS tahun 1975/1975, dan menjadi 20 miliar dolar AS pada tahun 1976/1977. Struktur ekonomi seperti ini mengakibatkan sektor swasta fokus kepada beberapa kegiatan ekonomi yang memiliki margin tinggi, seperti konstruksi, real estate, industri ringan, dibanding fokus kepada industri berskala besar (Ehteshami, 2002, hlm. 79).

Pahlavi merepresi kelompok-kelompok dalam masyarakat melalui organisasi bernama SAVAK (*Sāzemān-e Ettelā’āt va Amniyat-e Keshvar*). Amerika Serikat, sekutu dekat pemerintahan Iran kala itu, khawatir dengan keberlangsungan kekuasaan Reza Pahlavi sehingga membantu mendirikan SAVAK pada 1957 –kemudian berkembang pesat sehingga jumlah anggotanya mencapai 5000 orang --ditambah sejumlah anggota temporer yang tidak diketahui.

Ada informasi, dari tiap 450 orang ada satu orang yang merupakan anggota SAVAK. Dipimpin oleh Jenderal Nematollah Nasseri, salah seorang kroni dari Shah, SAVAK mempunyai kekuatan untuk mengawasi setiap orang Iran. Termasuk para pejabat tinggi, mensor media, menseleksi para pelamar pegawai pemerintah, bahkan juga menseleksi pelamar universitas. SAVAK menggunakan segala cara untuk menangani perusuh politik, termasuk melalui penyiksaan dan eksekusi, merepresi para aktivis, termasuk aktivis kiri. Ruang lingkup kerja SAVAK sangat besar, SAVAK ada di setiap kementerian, di setiap kelas. Setiap orang Iran tidak bisa mempercayai teman atau kerabat terdekatnya karena kemungkinan merupakan bagian dari SAVAK (Abrahamian, 2008, hlm. 126).

Menurunnya Popularitas Pahlavi

Popularitas Reza Pahlavi menurun bersamaan dengan menurunnya kapabilitas ekonomi Iran. Ketergantungan ekonomi Iran atas pinjaman luar negeri dan pemasukan dari minyak bumi menjadi boomerang, ketika, pasar minyak bumi dunia mulai mengalami stagnasi. Cadangan devisa menurun dengan drastis, sehingga Iran harus meminta pinjaman kepada *International Monetary*

Fund (IMF) yang memberikan syarat pengetatan pemakaian anggaran, memasukkan orang yang memiliki visi reformasi ekonomi di dalam kabinet, mempersilakan calon independen untuk bisa masuk ke dalam majelis (legislatif), dan juga memulai reformasi tanah. Rasionalisasi ekonomi dan liberalisasi mengakibatkan terjadinya aksi mogok dan protes pegawai pemerintah (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 80).

Resesi ekonomi di negara-negara Barat membuat permintaan atas pasokan energi menurun. Karena pertumbuhan pendapatan dari gas dan minyak menurun, maka pemerintah harus membatasi pengeluaran. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pencetakan uang lebih banyak untuk menutupi defisit fiskal. Akibatnya, inflasi pun menjadi semakin tinggi. Pada 1977/1978 pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar tiga persen, sementara, kekurangan pasokan listrik, air, semen, dan juga bahan pangan semakin membatasi *output* negara sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang semakin meluas (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 80).

Di luar harapan, revolusi putih yang seharusnya menjadi instrumen bagi shah untuk menggalang dukungan masyarakat justru menjadi katalisator terjadinya revolusi Islam tahun 1979 karena tiga alasan (Abrahamian, 2008, hlm. 139-143). *Pertama*, perubahan struktur sosial mengakibatkan bertambahnya kelas yang berpotensi untuk memberikan ancaman kepada kekuasaan Reza Pahlevi yaitu intelegentsia (intelektual, penulis, jurnalis, seniman, dan profesor) dan juga kelas pekerja urban. Di saat yang sama, reformasi lahan juga menciptakan kelas petani bebas yang selama berabad-abad terikat dengan para tuan tanah.

Kedua, kebijakan ekonomi *trickle down effect* malahan semakin memperlebar jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Pemberian dana dari minyak kepada elit yang akan mendirikan pabrik, perusahaan, dan agrobisnis seharusnya mampu mengalirkan kekayaan ke bawah. Namun pada praktiknya, kekayaan Iran, sebagaimana dibanyak negara, tetap terpusat di kalangan atas.

Ketiga, revolusi putih dan meledaknya pertumbuhan ekonomi oleh minyak mengakibatkan munculnya rasa permusuhan yang kuat dari rakyat karena tidak mampu memenuhi harapan publik. Meski ada peningkatan, namun, secara

umum kualitas kesejahteraan di Iran tergolong buruk. Revolusi putih pun tidak banyak menyentuh daerah pedesaan.

Kebijakan reformasi agraria mengakibatkan hancurnya sistem pertanian yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Sejatinya, pengelolaan lahan di Iran dilakukan oleh pembagian peran dalam sebuah sistem yang kompleks. Namun Shah mensimplifikasi sistem itu dan menganggap bahwa yang berkuasa di sektor pertanian di Iran adalah absentee landlord (tuan tanah yang tidak tinggal di tanah bersangkutan dan tidak/ jarang terlibat alam mengurus lahan).

Sistem pengelolaan lahan yang sebelumnya dijalankan dengan sistem komunal, fokus pengelolaannya ditransformasikan kepada negara --- entah secara langsung atau melalui perusahaan yang berkongsi dengan negara --- dan kepada individu/ swasta melalui disahkannya hak kepemilikan pribadi atas tanah.

Hasil dari perubahan radikal ini ialah hilangnya pekerjaan di bidang pertanian di desa-desa yang kemudian memaksa orang-orang di desa untuk hijrah ke kota demi janji modernisasi. Nantinya, proses urbanisasi ini menjadi salah satu penyebab gerakan begitu masif yang menuntut Shah untuk mundur dan berujung kepada revolusi (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 69-75).

Hal lain yang menjadi kontroversi bagi rakyat Iran adalah ketika Reza Pahlevi mengumumkan diberlakukannya hak pilih bagi perempuan pada 1963. Kontroversi ini menjadi sangat simbolis, karena, kala itu, pemilihan umum di Iran belum dapat disebut demokratis. Padahal, kalangan konservatif melihatnya sebagai preseden buruk dan menimbulkan protes yang sangat keras.

Kebanyakan, para pemrotes adalah pelajar dari sekolah-sekolah agama di Qom. Shah merespon protes ini dengan kekuatan militer. Secara umum, para agamawan tidak senang dengan perubahan yang dibawa Shah.

Namun, karena doktrin *taqiyyah*/diam dari aliran Islam Syiah, yakni kepasrahan untuk menerima pemerintah (walau dianggap tidak sah) sampai dengan datangnya Imam Keduabelas (al-Mahdi al-Muntazhar), ditambah dengan ketakutan akan adanya polisi rahasia, membuat kaum agamawan menahan diri untuk tidak berbicara (Foltz, 2016, hlm. 103).

Munculnya Khomeini sebagai Figur Perlawanan

Dalam perjalanannya, pada 1936, Reza Shah mengeluarkan kebijakan kontroversial di antaranya melarang penggunaan jilbab, bahkan, ia juga pernah memukul seorang agamawan ketika berujung ke Qom pada 1928 karena memprotes sang ratu yang melepas jilbabnya sehari sebelumnya. Meski begitu, pemerintahan otokratik Reza Shah tidak mendapatkan oposisi secara terbuka baik dari kalangan religius dan juga dari kalangan parlemen. Setelah melarang penggunaan jilbab, sekelompok pedagang mengadakan demonstrasi di Masyhad (salah satu kota suci penganut Syia'ah Imamiyah), tetapi, mereka berhasil dibungkam paksa. Dalam tahap ini, Khomeini belum memainkan peran yang signifikan dalam melawan penguasa (Foltz, 2016, hlm. 97).

Sejak pertengahan 1930-an, Khomeini mulai mengajar untuk umum di rumahnya sesuai dengan ajaran penafsir utama Molla Sadra (meninggal pada 1872). Murid dari Khomeini, Morteza Motahhari, adalah salah satu sekutu terdekatnya dalam melawan kekuasaan dinasti Pahlavi, begitu juga Hosein Ali Montazeri (Buchan, 2012, hlm. 80-81). Saat Reza Shah diturunkan Inggris dan Soviet pada 1941, Iran menjadi lebih terbuka. Pada 1944-1945, Khomeini pun berhenti mengajarkan ajaran Molla Sadra dan mulai menulis. Karyanya yang berjudul "Mengungkap Rahasia" diterbitkan secara anonim dan ditulis dalam bahasa Persia. Buku itu, selain berisikan tentang agama untuk mensucikan Syiah dari ritual populer dan juga pemujaan terhadap pengkultusan orang suci, juga membahas tentang politik seperti kritik atas proses penggantian takhta dari Reza Shah ke Reza Pahlavi (Buchan, 2012, hlm. 82).

Naiknya Pahlevi ke tampuk kepemimpinan tertinggi, tidak membuat hubungan agamawan dan penguasa tertinggi menjadi harmonis. Ayatollah Borujerdi, salah seorang mullah senior, meski tidak secara langsung terjun ke politik praktis, namun, ia mengkritik gaya hidup Shah yang kelewat glamor. Meski begitu, sebelum meninggal, Borujerdi mengeluarkan fatwa yang mengkritik kebijakan reformasi lahan yang dilakukan oleh Shah (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 71).

Setelah Borujerdi meninggal, Khomeini

mengambil alih tampuk kepemimpinan untuk menggalang perlawanan pada Shah. Perlawanan terbuka Ayatollah Khomeini dimulai saat Reza Pahlevi mengumumkan dibelakukannya hak pilih bagi perempuan pada 1963. Di Qom, Khomeini menjadi salah satu figur pembeda dibanding para ulama lain yang selama ini hanya memilih untuk diam. Khomeini menjadi figur protes yang dilakukan oleh para pelajar agama. Figur Khomeini dihargai karena secara terbuka ia berani menyuarakan penentangan kepada Shah (Foltz, 2016, hlm. 103).

Setelah melakukan orasi menentang Shah, Khomeini langsung ditangkap. Akibatnya, terjadi aksi massa yang menimbulkan korban jiwa. Dukungan luas dari rakyat diberikan karena Khomeini berhasil membangkitkan sentimen massa atas penguasa, salah satunya karena kedekatan Iran dengan Amerika Serikat (Clawson dan Rubin, 2005, hlm. 72). Karena keberaniannya, ia mendapat gelar Marja' Taqlid yang artinya pemimpin agama/madzhab yang dijadikan rujukan untuk diikuti. Khawatir dengan popularitas Khomeini, Shah segera mengasingkan Khomeini ke luar negeri. Akan tetapi, kebijakan ini terbukti tidak efektif. Khomeini menjadi lebih leluasa menyampaikan kritiknya kepada Shah (Foltz, 2016, hlm. 103). Khomeini tetap menjadi figur yang berpengaruh selama masa revolusi berlangsung. Kaset berisi rekaman orasi Khomeini diselundupkan ke Iran dan menjadi sumber inspirasi dalam melakukan perlawanan.

Setelah kepergian Khomeini, Shah membuat kebijakan dengan tujuan untuk merangkul lebih banyak rakyat dengan menciptakan sistem partai tunggal pada 1975. Rakyat harus ikut secara aktif di dalam politik lewat partai tunggal Rastakhiz (kebangkitan). Tingkat pendidikan yang meningkat karena revolusi putih ditambah dengan politisasi rakyat, ternyata, malah menjadi sumber semakin menguatnya penentangan terhadap Shah (Foltz, 2016, hlm. 103). Rastakhiz membangkitkan sentimen yang kuat dari pihak bazaar (pedagang) dan agamawan SAVAK masuk lewat partai Rastakhiz untuk mencari para pedagang yang tidak taat dengan pemerintah (Abrahamian, 2008, hlm. 151). Partai Rastakhiz juga menciptakan sentimen yang kuat dari kalangan agamawan dengan men-erang doktrin Islam di Iran.

Shah membentuk tim investigasi untuk mengawasi masalah keagamaan dengan menyatakan hanya institusi resmi yang bisa menerbitkan buku agama, dan mengembangkan sekolah teologi Universitas Tehran dan juga Korps Agama dan Literasi untuk bisa mengirimkan para mahasiswa ke desa-desa demi mengajarkan islam yang sesungguhnya.

Menurut ulama, negara mencoba untuk menasionalisasi agama melalui kebijakan ini. Selain itu, Shah membuat UU Perlindungan Keluarga tahun 1967. UU ini bertentangan dengan syariah, misalnya laki-laki tidak dapat menceraikan istrinya tanpa memberikan alasan yang masuk akal kepada pengadilan keluarga, laki-laki tidak dapat melakukan poligami tanpa mendapatkan izin tertulis dari istrinya, istri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian dan dapat bekerja di luar rumah tanpa perlu mendapat izin dari suaminya (Abrahamian, 2008, hlm. 152).

Semangat perlawanan juga muncul dari kalangan akademisi, kaum muda, masyarakat perkotaan terinspirasi lewat pemikiran Ali Syariati –dosen lulusan Prancis yang pemikirannya terinspirasi oleh semangat pembebasan, dunia ketiga, dan ideologi kiri. Syariati menghubungkan Islam dengan semangat untuk membangkitkan orang yang tertindas. Ia juga menyalahkan agamawan karena telah menyalahgunakan agama untuk kepentingannya. Para agamawan pun tidak senang dengan Syariati dan mencoba mengurangi pengaruhnya. Ali Syariati meninggal pada 1975 di Inggris. Jika Ali Syariati masih hidup sampai saat revolusi berlangsung, maka, ia akan memainkan peran yang sangat signifikan di masa revolusi (Abrahamian, 2008, hlm. 152).

Berbeda dengan agamawan lainnya, Khomeini mengambil sikap yang netral terhadap Syariati. Bahkan ia menggunakan slogan-slogan yang erat hubungannya dengan Marxisme. Gabungan antara narasi dunia ketiga dan agama islam terbukti sangat efektif saat Khomeini memimpin para agamawan melawan Shah. Munculnya para agamawan sebagai penggerak revolusi terjadi karena dua faktor. Pertama, oposisi liberal dan kiri seperti Tudeh dan National Front sudah menurun. Kedua, adanya figur Khomeini sebagai pemimpin yang kharismatik dan berdedikasi tinggi. Khomeini tidak hanya mampu membicarakan isu-isu

politik, akan tetapi, ia juga paham seluk beluk organisasi politik (Abrahamian, 2008, hlm. 89).

Revolusi

Semangat perlawanan rakyat terhadap partai Rastakhiz, terutama, karena sikap partai yang menekan masyarakat, pedagang, dan ulama dengan keras. Para pelajar agama di Fayzieh, di Qom langsung melakukan protes, pemerintah pun meresponnya dengan menutup sekolah agama itu. Bahkan, sekitar 250 siswanya dipaksa melakukan wajib militer dan salah satu siswanya meninggal di penjara. Banyak mujtahid terkemuka mengeluarkan fatwa bahwa Partai Rastakhiz tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan kepentingan Iran dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Menanggapi hal itu, Shah memenjarakan banyak agamawan secara bersamaan, sesuatu yang sebelumnya pernah terjadi di Iran (Abrahamian, 2008, hlm. 153-154).

Rentang 1977 menandakan dimulainya rangkaian demonstrasi besar yang ditujukan terhadap kepemimpinan Shah. Demonstrasi ini didukung oleh kelas menengah seperti Front National --- sisa dari partai Mossadegh --- dan juga kelompok Freedom Movement of Iran (FMI) tumbuh semakin besar dan terorganisasi (Foltz, 2016, hlm 107-108). Di awal tahun, pihak Front National dan sekitar 50 pengacara terkemuka mengedarkan surat terbuka kepada Shah mengkritik represi dan korupsi yang masif yang dilakukan oleh rezim, kemudian, pemerintah membalasnya dengan mensponsori demonstrasi tandingan pro Shah. Selanjutnya, November 1977, kematian anak Khomeini, Sayyid Mustafa, menimbulkan kecurigaan masyarakat kemudian melakukan keributan sebagai bentuk kekecewaan mereka (Martin, 2003. hlm. 149).

Januari 1978, untuk melawan kepopuleran Khomeini, surat kabar yang dikontrol pemerintah Ettela'at mengeluarkan tulisan tanpa nama. Akibatnya, tulisan tersebut memancing kemarahan lebih luas dari masyarakat. Dalam editorialnya, mereka menjelek-jelekkan Khomeini dan para agamawan sebagai "orang-orang jahat yang reaksioner" yang bekerja sama dengan feodalisme, imperialisme, dan tentu saja dengan komunisme.

Tidak cukup sampai di situ, tulisan itu juga menyatakan, di masa muda, Khomeini memiliki

kehidupan yang cabul, suka minum-minuman keras, dan juga menyukai puisi yang berbau mistik, bahwa Khomeini bukan orang Iran, kakeknya tinggal di Kashmir dan keluarganya juga memiliki nama tengah Hindi. Munculnya tulisan tersebut di atas, semakin menegaskan, bahwa rezim semakin kehilangan kontrol kekuasaannya sehingga bisa melakukan perbuatan bodoh seperti itu (Abrahamian, 2008, hlm. 158).

Dua hari setelah itu, para pelajar agama di Qom melakukan protes. Mereka membujuk para pedagang lokal dan mencari dukungan dari para agamawan senior—termasuk Grand Ayatollah Shariatmadari—yang akhirnya ikut pergi menemani para siswa ke kantor polisi terdekat sebagai simbol perlawanan terhadap pihak berwenang. Pihak pemerintah memperkirakan ada dua korban dari kejadian ini, sementara, pihak demonstran menyebutkan jumlah korban terbunuh mencapai 70 orang dan korban luka mencapai 500 orang.

Pemerintah menyebutkan para pelajar agama memprotes perayaan ulang tahun Reza Shah yang mengeluarkan kebijakan pelarangan pemakaian jilbab di muka umum. Namun, petisi yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah agama tidak menyebutkan sama sekali soal perayaan ulang tahun, akan tetapi, para pelajar menuntut permintaan maaf atas editorial yang menjelekkan Khomeini, pelepasan para tahanan politik, dikembalikannya Khomeini ke Iran, pembukaan kembali sekolah agama Fayzieh, dihilangkannya kekerasan fisik kepada para mahasiswa di Tehran, kebebasan berpendapat terutama untuk pers, independensi lembaga kehakiman, pemutusan hubungan dengan kekuatan imperial, dukungan kepada sektor agrikultur, dan dibubarkannya dengan segera Partai Kebangkitan (Abrahamian, 2008, hlm. 158).

Khomeini meminta kepada masyarakat untuk bereaksi kepada kekerasan yang dilakukan Shah terhadap aksi di Qom dengan melakukan aksi setiap empat puluh hari secara nasional dengan tidak melakukan kerja di hari itu dan mengikuti kegiatan keagamaan di masjid. Setelah itu, tiap empat puluh hari demonstrasi berulang. Tiap aksi lanjutan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Aksi pertama, di Februari, para pesertanya terutama dari Tabriz, kota asal dari Shariatmadari. Rezim dengan cepat menggunakan tank dan he-

likopter untuk mengendalikan massa.

Periode kedua terjadi di akhir Maret telah menyebabkan rusaknya banyak gedung di Yazd dan Isfahan. Shah sampai harus membatalkan rencana pergi ke luar negeri dan menginstruksikan kesatuan khusus polisi untuk mengendalikan massa. Aksi di Mei melibatkan dua puluh empat kota. Di Qom, polisi memasuki rumah milik Shariatmadari dan membunuh dua pelajar agama yang berlindung di dalamnya. Pihak pemerintah memperkirakan bahwa korban demonstran dari beberapa peristiwa itu hanya berjumlah 22 orang, sedangkan pihak oposisi mengklaim korban mencapai 250 orang (Abrahamian, 2008, hlm. 159).

Pada 19 Agustus --- dalam rangka memperingati kudeta 1953 yang menumbangkan Musaddiq--- sebuah gedung bioskop terbakar hebat menewaskan lebih dari 400 orang perempuan dan anak-anak. Publik menyalahkan pihak kepolisian lokal, yang dalam penugasan sebelumnya bertanggung jawab atas perintah penembakan di Qom. Setelah diadakan penguburan secara massal di luar kota, sekitar 10.000 orang keluarga dan teman korban pergi ke Abadan sambil meneriakkan, “Bakar Shah, sudahi dinasti Pahlavi.” Saat itu, ketidakpercayaan yang tertumpuk selama beberapa dekade akhirnya semakin jelas terlihat (Abrahamian, 2008, hlm. 159).

Peristiwa pertumpahan darah kedua terjadi pada 8 September 1978, sesaat setelah Shah memberlakukan hukum darurat militer. Shah melarang setiap perkumpulan di jalan-jalan, memerintahkan untuk menahan para pemimpin oposisi dan menunjuk seorang jenderal untuk menjadi gubernur militer di Tehran. Pasukan komando menembak orang-orang yang menolak untuk membubarkan diri saat sedang berkumpul di Lapangan Jaleh di pusat kota. Peristiwa 8 September dikenal luas dengan nama Jumat Hitam. Berbagai jurnalis melaporkan kejadian itu sebagai kejahatan militer terhadap rakyat sipil. Total korban meninggal mencapai 84 orang. Kejadian ini mempercepat perlawanan di seluruh negeri (Abrahamian, 2008, hlm. 159-161).

Tekanan yang semakin kuat terhadap Shah memaksanya untuk memberikan beberapa konsepsi. Shah memutuskan untuk melegalisasi partai politik membebaskan para tahanan politik dan menurup klub malam dan kasino. Alih-alih me-

nyenangkan, konsesi tersebut malahan membuat oposisi bertekad melanjutkan tekannannya karena yakin kekuatan Shah semakin melemah. Meski status efektif yang berlaku masih darurat militer, namun, aksi-aksi melawan Shah terus dilanjutkan (Foltz, 2016, hlm. 108).

Aksi massa oposisi memuncak pada 2 Desember 1978, pada hari Asyura atau 10 Muharram yang merupakan peringatan gugurnya Imam Hussein. Di hari itu, perwakilan dari Khomeini mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Pemerintah setuju tidak menggunakan kekuatan militer secara langsung dan hanya menempatkan mereka di sisi utara kota Tehran. Pihak oposisi setuju melakukan aksi dengan rute yang sudah disetujui dan tidak meneriakkan slogan yang menyerang Shah. Pada puncaknya, diadakan empat buah prosesi di lapangan Shahyad di sebelah barat Tehran. Hari itu, para wartawan internasional memperkirakan lebih dari dua juta orang mengikuti aksi yang kemudian disahkan dengan aklamasi untuk melakukan pembentukan negara Islam, kembalinya Khomeini, dihilangkannya pengaruh imperial dari Iran, dan pengimplementasian keadilan sosial bagi para “massa yang tertindas” (Abrahamian, 2008, hlm. 161).

Esoknya, demonstrasi terjadi di seluruh negeri dengan jumlah demonstran yang lebih banyak lagi. Shah menunjuk seorang anggota oposisi, pemimpin Front National, Shapur Bakhtiar sebagai perdana menteri. Tindakan ini dinilai sudah terlambat. Meningkatnya kerusuhan di seluruh Iran ditambah dengan keadaannya yang sedang sakit berat karena kanker, Shah meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979 dan tidak pernah kembali lagi. Shah berputar-putar ke banyak negara, terakhir ia ke Mesir kemudian meninggal karena penyakit kanker pada 27 Juli 1980. Lima ribu tahun tradisi monarki dan dinasti Pahlavi pun akhirnya berakhir (Foltz, 2016, hlm. 109).

Munculnya Negara Islam Iran

Setelah Shah pergi, Khomeini kembali ke Iran dengan menumpang pesawat carteran Air France 747. Waktu itu, ia ditemani oleh kelompok penasihatnya dan juga 120 jurnalis dari seluruh dunia. Kedatangannya disambut hangat oleh masyarakat Iran (Foltz, 2016, hlm. 110). Dalam proses revolusi ini, Mehdi Barzagan dari pihak seku-

ler ditunjuk menjadi presiden. Kemudian, dalam membentuk negara dengan ideologi baru adalah pembentukan konstitusi. Konstitusi baru Iran 1979, merupakan sebuah pionir yang sumbernya didapatkan dari hukum Islam, tetapi juga memiliki unsur demokratis di dalamnya berupa pemisahan pemerintahan negara kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Hiro, 2009, hlm. 368).

Dalam formulasi konstitusi, pihak Khomeini dan pengikutnya menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan pihak Mehdi Barzagan dan pengikutnya menginginkan konstitusi sesuai dengan konstitusi Republik Ke-V Perancis. Pada akhirnya, nilai Islam menjadi konsep yang dominan dalam konstitusi dengan pengaruh demokrasi. Konsep *velayat-e faqeh* (kepemimpinan oleh faqih/ cendekiawan muslim bidang ilmu Syari’at Islam) menjadi dasar utama bagi konstitusi Iran (Abrahamian, 2008, hlm, 162-163). Konstitusi memuat 175 pasal –ada tambahan 40 pasal saat Khomeini meninggal –yang akan tetap berlaku sampai dengan datangnya Imam Mahdi. Bagian preambule dimulai dengan keyakinan kepada Tuhan, Keadilan Suci, Quran, Hari Pengadilan, dan Nabi Muhammad, dua belas imam, kembalinya Imam Mahdi, dan yang paling penting konsep *velayat e-faqeh* Khomeini.

Konstitusi memperkuat sikap bangsa Iran atas segala bentuk otoritarianisme, kolonialisme, dan imperialisme. Bagian pendahuluan memberikan kepada Khomeini gelar Faqih tertinggi, pemimpin tertinggi (*Rahbar*), penuntun revolusi, pendiri Republik Islam, pembela kelompok mustazafin (orang-orang lemah), dan yang paling penting Imam dari seluruh umat muslim. Sebuah gelar yang belum pernah diberikan oleh muslim Syiah yang berarti orang dengan gelar ini tidak dapat berbuat salah. Khomeini didekralasikan sebagai pemimpin tertinggi untuk seumur hidup (Abrahamian, 2008, hlm, 163-164).

Struktur pemerintahan Iran menyiratkan negara demokratis, akan tetapi, ulama memiliki peran yang krusial di dalamnya. Sebagai pemimpin tertinggi, Khomeini memiliki kewenangan yang sangat luas, bahkan melebihi presiden. Pemimpin tertinggi mampu “menentukan apa yang dimaksud dengan kepentingan Islam”, “menentukan pedoman umum Republik Islam”, “mengawasi implementasi kebijakan”, dan “menjadi mediator

untuk bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif". Pemimpin tertinggi mampu memberikan amnesti dan menurunkan presiden dan para kandidat presiden. Pemimpin tertinggi adalah pemimpin dari angkatan bersenjata, ia mampu mendeklarasikan keadaan perang atau damai, mampu memobilisasi angkatan bersenjata, menunjuk pimpinan angkatan bersenjata dan mengadakan pertemuan dengan dewan keamanan nasional.

Sebagai tambahan, ia juga mampu menunjuk para pejabat tinggi di luar dari struktur formal negara, termasuk menunjuk direktur dari jaringan radio/televisi nasional, supervisor dari kantor imam salat Jumat, para pemimpin dari berbagai organisasi agamawan, ketua dari *Mustazafin Foundation* yang merupakan perubahan dari *Pahlavi Foundation*, editor utama dari dua koran utama Iran --- *Ettela'at* dan *Kayhan*. Lebih lanjut, pemimpin tertinggi mampu menunjuk ketua mahkamah agung, dan juga hakim-hakim di lembaga peradilan tingkat bawah, jaksa agung, dan yang paling penting adalah enam agamawan yang menjadi anggota dari Dewan Perwalian (majlis khubregan) (Abrahamian, 2008, hlm, 164).

Sementara, ulama yang lainnya mendapatkan tempat di dalam dewan perwalian. Mereka dapat memveto undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif jika undang-undang itu dilihat bertentangan dengan semangat dari konstitusi atau syariah Islam. Dewan Perwalian juga memiliki hak untuk memeriksa latar belakang dari para pejabat tinggi termasuk majlis (legislatif). Selanjutnya, amandemen konstitusi memberikan pemimpin tertinggi kekuatan tambahan untuk menunjuk Dewan Kebijaksanaan yang berfungsi untuk melakukan mediasi antara Majelis dan Dewan Perwalian (Abrahamian, 2008, hlm, 164).

Perubahan Politik dalam Revolusi Islam

Perubahan politik yang terjadi dalam revolusi Islam dapat ditelisik dari pelbagai komponen sesuai dengan yang diutarakan oleh Huntington. Sementara, dari sisi kebudayaan, Islam adalah sebuah sistem nilai yang mempengaruhi masyarakat Iran dalam bertindak. Disamping itu, budaya sastra yang kuat di masyarakat Iran –berisi ajaran-ajaran kebijaksanaan bersumber dari nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang selama ratusan tahun menjadi instrumen pendidikan karakter ma-

sarakat –telah membentuk watak dan kecenderungan masyarakat Iran yang peka dengan isu-isu sosial dan politik, sehingga menjadikan mereka tidak apatis terhadap proses sosial politik yang terjadi di negaranya bahkan di dunia. Dengan kata lain, masyarakat Iran sangat melek politik. Oleh karena itu, meski ada berbagai kelompok yang mengusung revolusi Islam, mereka semua terbukti bisa berdiri di bawah satu slogan. Slogan untuk menumpas monarki karena tidak sesuai dengan nilai Islam dan melawan monarki sebagai penindas untuk membebaskan orang-orang yang tertindas.

Dilihat dari segi struktur, gaya pemerintahan otokratik Reza Pahlevi, ternyata, mengakibatkan kekuasaan berputar di sekitar diri Shah. Lembaga negara yang lain dan juga perdana menteri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keputusan terakhir berada di tangan shah. Kekuasaan negara mencakup bahkan sampai ke tingkat urusan pribadi, urusan perdagangan dan sampai dengan daerah-daerah terpencil. Saat Iran menghadapi masalah, rakyat menyalahkan Shah sebagai sumber segala masalah sosial dan politik. Kecenderungan menyimpang dari kekuasaan absolut sejalan dengan ucapan sejarawan Inggris, Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*"

Seolah gayung bersambut, kekecewaan rakyat terhadap praktik kekuasaan absolut sekuler yang dipertontonkan Shah, menemukan antitesisnya pada sosok kharismatik Khomeini dengan ide *Velayat-e-Faghih* (kedaulatan di tangan ulama)-nya. Sesungguhnya, terdapat irisan konseptual cukup kuat antara konsep Monarki Iran dengan *Velayat-e-Faghih*, yakni kedua-duanya memusatkan kekuasaan pada satu orang sebagai figur sentral, minus pewarisan kekuasaan berbasis trah/dinasti. Ini artinya, konsep monarki dan sejenisnya sudah menjadi DNA bagi bangsa Iran, sehingga, ketika muncul ide alternatif yang mirip dengan konsep monarki tradisional tidak menimbulkan resistensi dari rakyat Iran. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Khomeini dan *Velayat-e-Faghih*-nya.

Sejatinya, dalam upaya penggulingan revolusi, banyak kelompok yang terlibat. Namun, secara umum terbagi menjadi dua pihak; yaitu kelompok agama dan kelompok sekuler. Kelompok sekuler semakin lemah kekuatannya terutama sejak penggulingan Perdana Menteri Musaddiq

pada 1953 dan juga meninggalnya Ali Syariati pada 1975. Melemahnya kelompok sekuler membuat kelompok islam mendapatkan panggung yang sesuai untuk tampil sebagai pemimpin melawan Shah. Secara umum, kelompok yang berbeda tersebut dipersatukan oleh sebuah tujuan bersama (*one common goal*), yaitu menjatuhkan Shah, yang merupakan musuh bersama (*common enemy*). Perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok tersebut salah satunya lebur disebabkan oleh irisan ideologis dan irisan ketokohan.

Irisan ideologis terlihat sangat jelas antara kelompok agamis dan sekuler (baik kiri ataupun kanan), terkait isu pembelaan orang-orang tertindas. Sementara, irisan ketokohan nampak pada Ali Syariati yang merupakan intelektual berhaluan kiri dengan latar belakang santri (notabene anak seorang ulama); Begitu pula dengan Khomeini, ulama tradisional, akan tetapi *anti-mainstream*. Hal tersebut terlihat dari inovasinya untuk membawa filsafat ke *hauzah* (pesantren) yang mengundang pertentangan dari ulama-ulama konservatif. Hal ini memberikan akseptabilitas oleh kelompok sekuler atas sosok Khomeini.

Dari segi kepemimpinan, tidak dapat dipungkiri, Ayatollah Khomeini adalah figur fenomenal yang mampu menyatukan rakyat Iran dari berbagai golongan. Ia berani melawan Shah saat yang lain belum menunjukkan penolakan secara terang-terangan. Meski selama berlangsungnya revolusi sampai perginya Reza Pahlevi ke luar Iran, Khomeini ada di luar negeri, namun, ia mampu memobilisasi para pengikutnya dari Perancis.

Rakyat secara tidak langsung merasa dekat dengan Khomeini karena mereka rutin mendengarkan ceramahnya di masjid-masjid melalui media kaset yang diselundupkan. Kemudian, sosok Khomeini dipahami oleh rakyat Iran sebagai antitesis Shah. Perjalanan hidupnya seakan-akan me-nubuwah-kan kelak ia bakal menjadi orang besar. Ayahnya dibunuh agen Shah karena perlawanannya, ke-sederhanaan hidupnya, dan keberaniannya melawan telah memperkuat pembentukan kharismanya sebagai sosok antitesis Shah, sekaligus sebagai figur pemimpin alternatif.

Pola kebijakan yang diusung pemerintah adalah politik represif dan peminggiran. Shah menggunakan SAVAK untuk membeikan tekanan kepada setiap calon potensial pembuat keonaran yang akan merugikan Shah. Rakyat banyak yang

kehilangan tanah dan pekerjaan, sehingga mereka terpaksa pergi ke kota. Warga yang menganggur kemudian banyak menghabiskan waktu di masjid, mendengar retorika perlawanan dari ulama, terutama dari rekaman Khomeini. Kebijakan partai tunggal yang memaksa warga untuk berpartisipasi dalam politik nyatanya membuat rakyat semakin terpolitisasi dan semakin berani menyuarakan ketidak sukuaan mereka pada shah. Perubahan struktur demografi dan juga politisasi masyarakat inilah yang memuluskan revolusi Islam di Iran. Selain itu, sejumlah kebijakan Shah yang mengundang kontroversial, seperti penerapan hukum kekebalan bagi warga negara Amerika Serikat di Iran, dirasa mencederai harga diri kebangsaan yang secara turun-temurun diwariskan sebagai bangsa unggul (ras Arya) sekaligus harga diri keagamaan sebagai umat terbaik (umat Islam).

Dengan memperhatikan kelima komponen itu, Shah melakukan kesalahan kebijakan yang semakin menurunkan popularitas dirinya. Kelima komponen itu saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan prakondisi yang sesuai bagi perubahan di masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada perkembangan politik di Iran di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi? Perkembangan politik menandakan sesuatu yang positif dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul mengancam sistem politik. Konteks revolusi Islam di Iran dapat didalami dengan lima kriteria perkembangan politik Almond dan Powell.

Pertama, rezim memiliki kemampuan ekstraktif untuk mengumpulkan sumber daya alam. Buktinya pemasukan negara dari minyak bumi meningkat dengan pesat, dalam konteks tertentu rakyat juga dapat dimobilisasi. Buktinya, jumlah pegawai negeri dan tentara meningkat dengan drastis. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kualitas itu baik? Nyatanya, pada akhir kekuasaan, rezim tidak dapat menggantungkan diri kepada minyak bumi. Selain itu, ternyata, banyaknya jumlah personil militer dan birokrasi tidak dapat mencegah revolusi. Militer memilih tidak ikut campur dalam proses revolusi.

Kedua, kontrol terhadap rakyat dilakukan dengan cara yang koersif melalui SAVAK. Akibatnya, rakyat tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan sistem nilai yang diinginkan oleh pemerintah.

Ketiga, sistem distributif tidak berjalan dengan baik. Kekayaan Iran tertumpuk di tangan Shah dan para kroninya. Shah memiliki institusi *Pahlavi Foundation* untuk mengumpulkan harta masyarakat, akan tetapi, tidak terdistribusikan dengan baik. Sekutu terdekat Shah mendapatkan konsesi untuk mengelola kekayaan negara yang malahan masuk ke kantung pribadi. Masyarakat urban berkembang dengan cepat, akan tetapi, kesenjangan antara kota dan desa begitu tinggi sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Keempat, kapabilitas simbolis tidak berjalan dengan baik. Shah menarasikan kejayaan Iran yang dipimpin oleh monarki sejak 2500 tahun yang lalu. Namun, kebijakan peminggiran, kesenjangan, dan juga represi dari Shah membuat rakyat tidak menghormati simbol negaranya. Justru mereka mencari nilai baru yang pantas dijadikan acuan untuk kehidupan sehari-hari yang bebas dari penindasan.

Kelima, kemampuan responsif dari sistem otokratik dinasti Pahlavi tidak dapat menjadi penangkal ketidakpuasan rakyat. Saat rakyat mulai tidak puas dengan kebijakan pemerintah, Shah malahan semakin menekan rakyat dengan kuat melalui SAVAK dan juga sistem partai tunggal. Saat revolusi semakin memuncak, upaya Shah untuk memperbaiki pemerintahan dengan membebaskan pembentukan partai politik, membebaskan tahanan politik, dan menutup kasino (untuk memuaskan kaum agamis) justru menjadi tanda bagi pihak oposisi untuk meningkatkan tekanannya karena sadar bahwa kekuasaan Shah semakin melemah.

Simpulan

Sistem politik dalam pemerintahan Reza Pahlavi, ternyata, tidak berjalan dengan baik sehingga menginisiasi perubahan politik menuju kejatuhan rezim, dibanding menjadi sarana untuk mempertahankan rezim. Komponen-komponen dalam sistem politik dari segi budaya, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan pola kebijakan yang disebutkan Huntington pelan-pelan mendorong rakyat untuk melawan Shah. Di awal kekuasaan, perubahan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kemudian meledak di akhir-akhir kekuasaan sebagai akibat dari akumulasi ketidakpuasan oleh masyarakat selama dua dekade lebih.

Kepemimpinan Reza Pahlevi juga ti-

tidak menghasilkan perkembangan politik ke arah yang lebih baik --- padahal, kenyataan tersebut yang dibutuhkan oleh sebuah sistem politik untuk mengekalkan eksistensinya. Dalam konteks tertentu, pada kriteria yang diajukan Almond dan Powell, ada fakta yang menunjukkan bahwa rezim Shah memiliki kriteria itu, akan tetapi, saat didalami, ternyata, kualitas tersebut tergolong buruk.

Kasus revolusi Islam di Iran pada 1979, ternyata memiliki logika yang cukup berbeda. Kenyataannya, tidak terjadi perkembangan politik dalam arti positif yang mampu mendukung keberlangsungannya rezim. Terlebih lagi, Shah juga tidak berhasil membangun komponen-komponen yang mendukung berjalannya sistem, sehingga pada akhirnya, republik Islam muncul menggantikan monarki Iran yang sudah berusia 2500 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamian, Ervand. (2008). *A History of Modern Iran*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Basuki, Sulistyono. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Buchan, James. (2012). *Days of God: The Revolution in Iran and Its Consequences*. London: Hachette.
- Clawson, Patrick, & Rubin, Michael. (2005). *Eternal Iran: Continuity and Chaos*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ehteshami, Anoushiravan. (2002). *After Khomeini: The Iranian Second Republic (2nd ed.)*. New York: Routledge.
- Foltz, Richard. (2016). *Iran in World History*. New York: Oxford University Press.
- Hiro, Dilip. (2009). *Inside Central Asia: A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, dan Iran*. London: Overlook Duckworth.

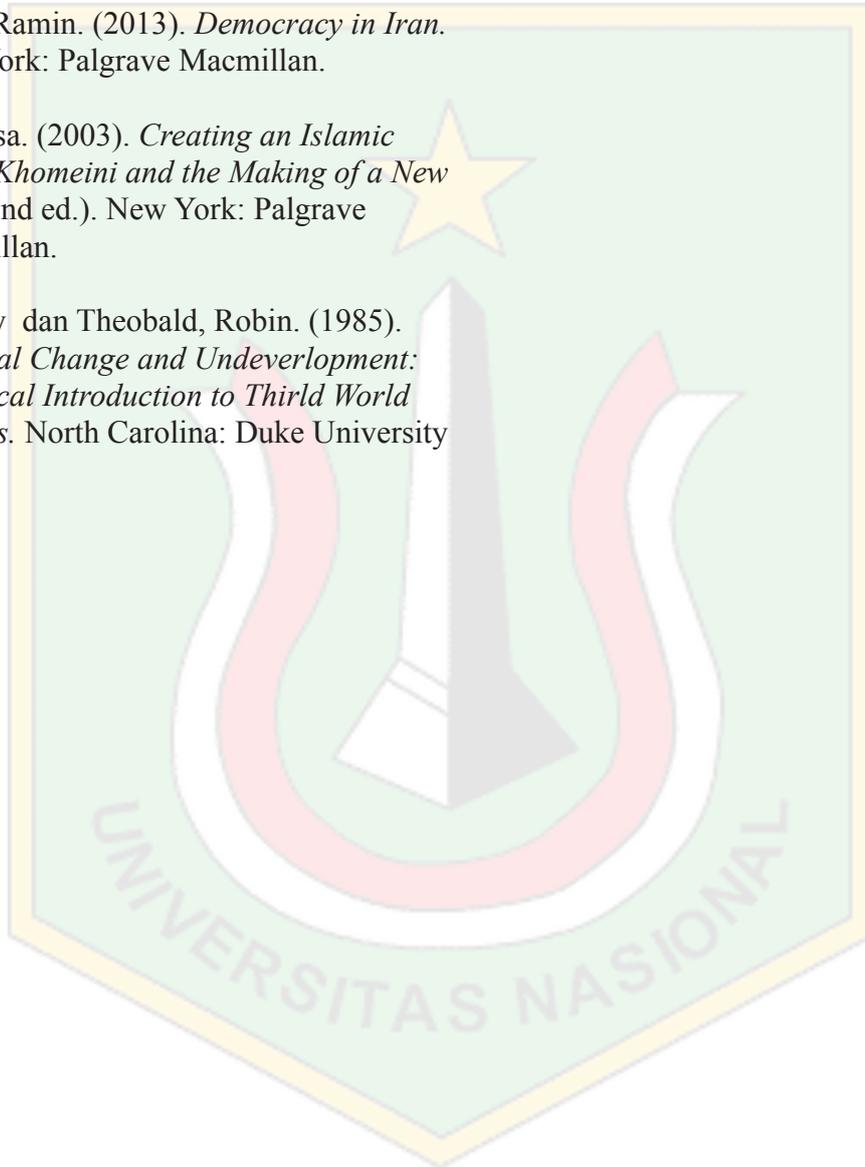
Huntington, Samuel P. (1971).

The Change to Change: Modernization, Development, and Politics. Comparative Politics, Vol. 3, No. 3 (Apr.,1971), hlm. 283-322.

Jahanbegloo, Ramin. (2013). *Democracy in Iran*. New York: Palgrave Macmillan.

Martin, Vanessa. (2003). *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of a New Iran* (2nd ed.). New York: Palgrave Macmillan.

Randall, Vicky dan Theobald, Robin. (1985). *Political Change and Underdevelopment: a Critical Introduction to Thirld World Politics*. North Carolina: Duke University Press.



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**